KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO I LANTAI 2
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON : (021) 3994230 (20 SALURAN) PSW 5200,5204, (021) 3450959, 3865130 FAKSIMILI : (021) 3846402
SITUS : www.djpbn.kemenkeu.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR PENG- 4 /PB/2017

TENTANG

PELAKSANAAN SERTIFIKASI BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2017

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2016 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia akan melaksanakan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 melalui **mekanisme pengakuan Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Bendahara dan/atau Sertifikat Profesi Bendahara** sebagai berikut:

A. SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN

1. Bagi calon peserta yang menduduki jabatan Bendahara:
   a. Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
   b. Pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
   c. Golongan paling rendah II/b atau sederajat; dan
   d. Memiliki salah satu dari sertifikat sebagai berikut:
      1) Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Bendahara yang diterbitkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan **sebelum tanggal 20 Januari 2016**;
      2) Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Bendahara yang diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan lainnya **sebelum tanggal 20 Januari 2016**;
      3) Sertifikat Profesi Bendahara yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) **sebelum tanggal 20 Januari 2016**.
2. Bagi calon peserta yang tidak sedang menduduki jabatan Bendahara:
   a. Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
   b. Pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
   c. Golongan paling rendah II/b atau sederajat; dan

d. Memiliki salah satu dari sertifikat sebagai berikut:
   1) Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Bendahara yang diterbitkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan, **dengan tanggal sertifikat 20 Januari 2011 sampai dengan 19 Januari 2016**;
   2) Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Bendahara yang diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan lainnya, **dengan tanggal sertifikat 20 Januari 2011 sampai dengan 19 Januari 2016**;
   3) Sertifikat Profesi Bendahara yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) **sebelum tanggal 20 Januari 2016**.

B. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran Sertifikasi Bendahara dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) mulai **tanggal 31 Juli sampai dengan 1 September 2017**.
2. Tata cara pendaftaran Sertifikasi Bendahara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2016 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Calon peserta sertifikasi bendahara **wajib** membaca peraturan sebagaimana dimaksud angka 2.
4. Format Formulir Pendaftaran Sertifikasi Bendahara dan dokumen lainnya yang terkait dengan pendaftaran Sertifikasi Bendahara dapat diperoleh di TUK atau diunduh melalui situs http://www.djpbn.kemenkeu.go.id.
5. Pengisian Formulir Pendaftaran Sertifikasi Bendahara dan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dilakukan sesuai dengan petunjuk pengisian.
6. Adapun ketentuan dan dokumen persyaratan pendaftaran yang perlu disampaikan pada TUK yaitu sebagai berikut:
   a. Bagi calon peserta yang menduduki jabatan Bendahara:
      1) Dokumen persyaratan umum pendaftaran yang terdiri dari:
         a) Formulir Pendaftaran Sertifikasi Bendahara;
         b) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dengan format JPG/PDF berukuran maksimal 400 KB;
         c) Fotokopi Surat Keputusan (SK) Kepangkatan/Golongan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dengan format JPG/PDF berukuran maksimal 400 KB;
         d) Surat usulan nama calon peserta Sertifikasi dari Kepala Satker. **Usulan yang dikirimkan tidak melalui Kepala Satker tidak akan diproses lebih lanjut**;
         e) Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 (berlatar belakang merah dan paling lama enam bulan terakhir), sebanyak 2 (dua) lembar, di bagian belakang setiap pas foto ditulis identitas peserta (nama dan NIP) dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dengan format JPG berukuran maksimal 400 KB.

2) Dokumen persyaratan tambahan pendaftaran yang terdiri dari:
   a) Fotokopi SK penunjukan sebagai Bendahara yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dengan format JPG/PDF berukuran maksimal 400 KB;
   b) Fotokopi Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Bendahara yang diterbitkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan, **dengan tanggal sertifikat sebelum 20 Januari 2016** yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dengan format JPG/PDF berukuran maksimal 400 KB; atau
   c) Fotokopi Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Bendahara yang diterbitkan oleh lembaga Pendidikan dan Pelatihan lainnya, **dengan tanggal sertifikat sebelum 20 Januari 2016** yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dengan format JPG/PDF berukuran maksimal 400 KB; atau
   d) Fotokopi Sertifikat Profesi Bendahara yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi **dengan tanggal sertifikat sebelum 20 Januari 2016** yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* berukuran maksimal 400 KB.

b. Bagi calon peserta yang tidak menduduki jabatan bendahara:
   1) Dokumen persyaratan umum pendaftaran yang terdiri dari:
      a) Formulir Pendaftaran Sertifikasi Bendahara;
      b) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dengan format JPG/PDF berukuran maksimal 400 KB;
      c) Fotokopi Surat Keputusan (SK) Kepangkatan/Golongan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dengan format JPG/PDF berukuran maksimal 400 KB;
      d) Surat usulan nama calon peserta Sertifikasi dari kepala Satker. **Usulan yang dikirimkan tidak melalui Kepala Satker tidak akan diproses lebih lanjut**;
      e) Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 (berlatar belakang merah dan paling lama enam bulan terakhir), sebanyak 2 (dua) lembar, di bagian belakang setiap pas foto ditulis identitas peserta (nama dan NIP) dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dengan format JPG berukuran maksimal 400 KB.
   2) Dokumen persyaratan tambahan pendaftaran antara lain:
      a) Fotokopi Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Bendahara yang diterbitkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan, **dengan tanggal sertifikat 20 Januari 2011 sampai dengan 19 Januari 2016** yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dengan format JPG/PDF berukuran maksimal 400 KB; atau

b) Fotokopi Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Bendahara yang diterbitkan oleh lembaga Pendidikan dan Pelatihan lainnya, **dengan tanggal sertifikat 20 Januari 2011 sampai dengan 19 Januari 2016** yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dengan format JPG/PDF berukuran maksimal 400 KB; atau

c) Fotokopi Sertifikat Profesi Bendahara yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi **dengan tanggal sertifikat sebelum 20 Januari 2016** yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dengan format JPG/PDF berukuran maksimal 400 KB.

7. Calon peserta yang telah lolos verifikasi administratif dokumen persyaratan pendaftaran pada TUK diterbitkan Tanda Bukti Registrasi (TBR) oleh TUK.
8. Calon peserta yang tidak lolos verifikasi administratif dokumen persyaratan pendaftaran pada TUK tidak diterbitkan TBR oleh TUK dan dapat melengkapi kembali berkas persyaratannya dalam periode pendaftaran sebagaimana dimaksud pada **angka 1.**

C. TEMPAT UJI KOMPETENSI (TUK)

Daftar Tempat Uji Kompetensi adalah sebagai berikut:

No.	Provinsi	TUK
1.	Aceh	1. KPPN Banda Aceh 2. KPPN Lhokseumawe 3. KPPN Meulaboh 4. KPPN Langsa 5. KPPN Tapaktuan 6. KPPN Kutacane 7. KPPN Takengon
2.	Sumatera Utara	1. KPPN Medan I 2. KPPN Medan II 3. KPPN Tebingtinggi 4. KPPN Pematang Siantar 5. KPPN Padang Sidempuan 6. KPPN Tanjung Balai 7. KPPN Gunung Sitoli 8. KPPN Rantau Prapat 9. KPPN Sibolga 10. KPPN Sidikalang 11. KPPN Balige
3.	Sumatera Barat	1. KPPN Padang 2. KPPN Bukittinggi 3. KPPN Solok 4. KPPN Lubuk Sikaping 5. KPPN Sijunjung 6. KPPN Painan
4.	Riau	1. KPPN Pekanbaru 2. KPPN Dumai 3. KPPN Rengat
5.	Kepulauan Riau	1. KPPN Tanjung Pinang 2. KPPN Batam

6.	Jambi	1. KPPN Jambi 2. KPPN Bangko 3. KPPN Sungai Penuh 4. KPPN Muara Bungo 5. KPPN Kuala Tungkal
7.	Sumatera Selatan	1. KPPN Palembang 2. KPPN Baturaja 3. KPPN Lahat 4. KPPN Sekayu 5. KPPN Lubuk Linggau
8.	Bandar Lampung	1. KPPN Bandar Lampung 2. KPPN Metro 3. KPPN Kotabumi 4. KPPN Liwa
9.	Bengkulu	1. KPPN Bengkulu 2. KPPN Curup 3. KPPN Mukomuko 4. KPPN Manna
10.	Bangka Belitung	1. KPPN Pangkal Pinang 2. KPPN Tanjung Pandan
11.	Banten	1. KPPN Serang 2. KPPN Tangerang 3. KPPN Rangkasbitung
12.	DKI Jakarta	1. KPPN Jakarta I 2. KPPN Jakarta II 3. KPPN Jakarta III 4. KPPN Jakarta IV 5. KPPN Jakarta V 6. KPPN Jakarta VI 7. KPPN Jakarta VII
13.	Jawa Barat	1. KPPN Bandung I 2. KPPN Bandung II 3. KPPN Bekasi 4. KPPN Bogor 5. KPPN Sukabumi 6. KPPN Cirebon 7. KPPN Tasikmalaya 8. KPPN Kuningan 9. KPPN Purwakarta 10. KPPN Garut 11. KPPN Karawang 12. KPPN Sumedang
14.	Jawa Tengah	1. KPPN Semarang I 2. KPPN Semarang II 3. KPPN Surakarta 4. KPPN Pati 5. KPPN Kudus 6. KPPN Pekalongan 7. KPPN Tegal 8. KPPN Purwokerto 9. KPPN Magelang 10. KPPN Klaten 11. KPPN Sragen 12. KPPN Purworejo 13. KPPN Purwodadi 14. KPPN Banjarnegara 15. KPPN Cilacap
15.	D.I. Yogyakarta	1. KPPN Yogyakarta 2. KPPN Wonosari 3. KPPN Wates

16.	Jawa Timur	1. KPPN Surabaya I 2. KPPN Surabaya II 3. KPPN Sidoarjo 4. KPPN Malang 5. KPPN Pamekasan 6. KPPN Bondowoso 7. KPPN Madiun 8. KPPN Kediri 9. KPPN Blitar 10. KPPN Mojokerto 11. KPPN Jember 12. KPPN Bojonegoro 13. KPPN Banyuwangi 14. KPPN Tuban 15. KPPN Pacitan
17.	Kalimantan Barat	1. KPPN Pontianak 2. KPPN Singkawang 3. KPPN Sanggau 4. KPPN Ketapang 5. KPPN Sintang 6. KPPN Putussibau
18.	Kalimantan Tengah	1. KPPN Palangkaraya 2. KPPN Buntok 3. KPPN Pangkalan Bun 4. KPPN Sampit
19.	Kalimantan Selatan	1. KPPN Banjarmasin 2. KPPN Tanjung 3. KPPN Barabai 4. KPPN Pelaihari 5. KPPN Kotabaru
20.	Kalimantan Timur	1. KPPN Samarinda 2. KPPN Balikpapan 3. KPPN Tarakan 4. KPPN Tanjung Redeb 5. KPPN Nunukan
21.	Bali	1. KPPN Denpasar 2. KPPN Singaraja 3. KPPN Amlapura
22.	Nusa Tenggara Barat	1. KPPN Mataram 2. KPPN Bima 3. KPPN Selong 4. KPPN Sumbawa Besar
23.	Nusa Tenggara Timur	1. KPPN Kupang 2. KPPN Waingapu 3. KPPN Ruteng 4. KPPN Atambua 5. KPPN Larantuka 6. KPPN Ende
24.	Sulawesi Selatan	1. KPPN Makassar I 2. KPPN Makassar II 3. KPPN Pare-Pare 4. KPPN Palopo 5. KPPN Bantaeng 6. KPPN Sinjai 7. KPPN Benteng 8. KPPN Watampone 9. KPPN Makale
25.	Sulawesi Barat	1. KPPN Mamuju 2. KPPN Majene

26.	Sulawesi Tengah	1. KPPN Palu 2. KPPN Poso 3. KPPN Luwuk 4. KPPN Tolitoli
27.	Sulawesi Tenggara	1. KPPN Kendari 2. KPPN Bau-Bau 3. KPPN Raha 4. KPPN Kolaka
28.	Gorontalo	1. KPPN Gorontalo 2. KPPN Marisa
29.	Sulawesi Utara	1. KPPN Manado 2. KPPN Kotamobagu 3. KPPN Bitung 4. KPPN Tahuna
30.	Maluku Utara	1. KPPN Ternate 2. KPPN Tobelo
31.	Maluku	1. KPPN Ambon 2. KPPN Masohi 3. KPPN Tual 4. KPPN Saumlaki
32.	Papua Barat	1. KPPN Manokwari 2. KPPN Sorong 3. KPPN Fak-Fak
33.	Papua	1. KPPN Jayapura 2. KPPN Merauke 3. KPPN Biak 4. KPPN Serui 5. KPPN Nabire 6. KPPN Wamena 7. KPPN Timika

D. PENGUMUMAN HASIL SERTIFIKASI BENDAHARA

Informasi pengumuman hasil sertifikasi bendahara dapat dilihat pada Tempat Uji Kompetensi dan situs http://www.djpbn.kemenkeu.go.id.

E. LAIN-LAIN

1. Penerbitan Sertifikat Bendahara bagi peserta yang telah memenuhi syarat akan dilakukan setiap tahun berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Unit Penyelenggara.
2. Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut terkait dengan proses pendaftaran, calon peserta dapat menghubungi Sekretariat Unit Penyelenggara Sertifikasi Bendahara melalui telepon: (021) 3846822 atau *e-mail*: sertifikasi.bendahara@kemenkeu.go.id atau Tempat Uji Kompetensi setempat.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2017

a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan
Direktur Sistem Perbendaharaan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

R.W. WIWIENG HANDAYANINGSIH
NIP 196202161984012001